



Pengaruh Budaya Politik Terhadap Perilaku Politik Masyarakat Menjelang Pemilu 2024 Di Kecamatan Percut Sei Tuan

Saparutdin Brutu¹, Latifah hanum Gultom², Johana Adriani Nainggolan³,
Desy yolanda Bangun⁴, Enjelina Sinaga⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Medan, Indonesia

Corresponding Author : ✉ mitamanurung01@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of political culture on people's political behavior in the upcoming 2024 elections in Percut Sei Tuan District. The results of the study show that the majority of people in Percut Sei Tuan District have a participatory political culture that is supported by high political awareness. However, several factors such as education, mass media, family, and religion have an impact on people's political behavior. Political parties also play an important role in influencing people's political behavior, particularly in disseminating information and conducting political campaigns. Therefore, efforts are needed to increase the participation and political awareness of the people in Percut Sei Tuan District, especially through education and effective political campaigns. The government and educational institutions prioritize political education and increase public knowledge about the political process and their political rights. Political parties must comply with ethical standards and avoid unethical practices in carrying out effective and transparent political campaigns to increase public participation in the political process. The government must ensure the accessibility of elections for all citizens, especially for people with disabilities or who live in remote areas, as well as ensure visibility and findability in the electoral process. Communities in Percut Sei Tuan District should be encouraged to actively participate in the political process and the upcoming 2024 elections through public discussion forums and participatory programs.

Kata Kunci

Political Culture, Political Behavior, Elections, Society

PENDAHULUAN

Budaya politik merupakan sebuah pola pikir, sikap dan perilaku yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah dalam menyikapi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Budaya politik masyarakat harus memiliki budaya politik yang baik sebelum pelaksanaan pilpres tahun 2024, karena mempengaruhi pola perilaku masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, dalam penyelenggaraan administrasi publik, kebijakan pemerintah, hukum, adat istiadat. dan jika pada tahun 2024 demokrasi kepartaian nilai budaya politik di Indonesia dilaksanakan dngan baik, maka para pemimpin di tahun 2024 kriteria nya harus orang-orang yang ber kompeten dan cakap dalam hal

politik sehingga berbagai pihak harus ikut membangun etika dan budaya politik untuk menciptakan . budaya politik. Demokrasi di Indonesia, berfokus pada penekanan pemahaman. Pemilihan umum merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi secara langsung melalui perwujudan prinsip kedaulatan di tangan rakyat, sehingga pada akhirnya tercipta hubungan kekuasaan dari rakyat dan untuk rakyat. Budaya yang melibatkan pola perilaku sosial dan politik termasuk dalam bagian dari dinamika budaya. Diharapkan dengan adanya perkembangan budaya kiranya harus mempengaruhi perkembangan politik ke arah yang lebih baik.

Di tengah perkembangan zaman, politik cenderung mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Padahal, ditambahnya, dinamika manusia di segala bidang kehidupan selalu mengarah pada kemaslahatan umat manusia, kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan bersama. Kesadaran mutlak yang dimaksudkan harus ditanamkan pada setiap warga negara bahwa budaya mewakili seluruh rakyat Indonesia dan politik adalah cara untuk menempatkan bangsa Indonesia pada posisi tertinggi melalui semangat politik kebangsaan. Hubungan antara budaya politik dan demokratisasi sangat erat. Budaya politik memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan demokrasi. Demokratisasi tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh pengembangan budaya politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Di Indonesia sendiri, budaya kerap sekali banyak mengalami perubahan. Adapun perubahan yang terjadi itu dipengaruhi oleh modernisasi yang bisa menimbulkan gejala perubahan sosial. Perubahan sosial tersebut berasal dari masyarakat Indonesia sendiri dan berasal dari faktor internal dan eksternal. Dalam menanggapi tuntutan perubahan, sulit untuk menghindari dua sikap yang berlawanan secara diametral, yaitu “mendukung” (positif) dan “menentang” (negatif). Sebagai proses perubahan dalam menciptakan kehidupan politik yang baik, perwujudan demokratisasi juga berhadapan dengan dua kutub yang berseberangan, yaitu budaya politik masyarakat, yang mendukung (positif) dan menghambat (negatif) proses demokratisasi. Budaya politik yang matang memanasifestasikan dirinya sebagai orientasi, pandangan, dan sikap individu terhadap sistem politiknya sendiri. Budaya politik yang demokratis mendukung terciptanya sistem politik yang demokratis. Adanya fenomena demokrasi dalam budaya politik yang berkembang di masyarakat tidak hanya terlihat dalam interaksi individu dengan sistem politiknya, tetapi juga dalam interaksi individu dalam konteks kelompok atau kelompok dengan kelompok sosial lainnya. dan kelompok Dengan kata lain, budaya politik terlihat dalam manifestasinya dalam hubungan antara masyarakat dan struktur

politiknya, dan dalam hubungan antar kelompok dan kelompok dalam masyarakat.

Perbedaan antara budaya politik dan perilaku politik dapat dipengaruhi oleh budaya politik. Namun, budaya politik tidak selalu bergantung pada perilaku politik. Sistem budaya politik Indonesia tidak berkembang dengan baik setelah orde baru atau pada masa reformasi, karena proses transisi tidak melalui proses demokrasi, sehingga memasuki masa reformasi, budaya politik demokrasi akhirnya menjadi sulit. membangun demokrasi yang baik sekarang.

Dapat dilihat dari banyaknya konflik dalam pemilu disebabkan oleh persoalan budaya politik, misalnya untuk siap hanya menang, tapi tidak kalah. Karena sering terlihat peserta yang kalah dalam pilkada tidak begitu saja mengakui kemenangan lawannya, tetapi pendukung pasangan calon melakukan aksi massa dan terjadi bentrok, meskipun mekanisme melalui jalur hukum sudah ada, bisa disimpulkan. bahwa hal ini terjadi karena budaya politik yang belum demokratis

Karena tahun 2024 adalah pesta demokrasi di Indonesia, diikuti dengan penerapan nilai-nilai budaya politik yang benar, maka pemimpin yang lahir dari pemungutan suara dan pilkada tahun 2024 haruslah orang-orang yang kompeten dan cakap, sehingga berbagai pihak harus ikut serta dalam pembangunan politik. Etika dan Budaya Membangun Budaya Politik Demokrasi di Indonesia Berfokus pada Penekanan Pemahaman.

Masyarakat harus mampu aktif dan kritis terhadap politik lokal, menyalurkan konflik kepentingan dari tingkat masyarakat ke lembaga perwakilan untuk penyelesaian secara damai dan adil, sehingga tidak menimbulkan konflik berkepanjangan yang timbul dari pemilu, untuk menjamin persatuan dan rasa hormat terhadap masyarakat. politik. partai politik dan berbagai elemen lainnya diharapkan hadir untuk memberikan pendidikan politik, termasuk kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. Demokrasi memberi ruang bagi heterogenitas Indonesia, menjamin terjaganya pluralisme dan toleransi perbedaan, serta memperkuat integrasi nasional.

Menurut Kantrapriwara (1988) budaya politik tidak lain dari pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Eksistensi budaya politik terhadap perilaku politik berhubungan erat dengan artikulasi inspirasi masyarakat itu sendiri, atau dengan kata lain bahwa aspirasi masyarakat tidak lain merupakan kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan yang sedang dirasakan masyarakat adalah motif yang mendorong mereka berpartisipasi dalam perilaku politiknya.

Dalam dunia politik faktor budaya memegang peran yang sangat penting dari masa ke masa dimana alur sebuah kebijakan politik suatu bangsa ditentukan oleh sistem structural pada masanya. Hal ini karena budaya politik diaktualisasikan dalam pola sikap terhadap masalah politik dan peristiwa politik yang terjadi. Berdasarkan kenyataan yang terjadi belakangan ini, sistem politik terus mengalami perkembangan dalam tatanan perpolitikannya. Seseorang dapat mengalami dampak dari berbagai bentuk dan tahapan proses politik. Setiap warga negara harus memiliki kesadaran politik serta mampu memahami dunia politik dengan baik. Perilaku politik masyarakat dalam setiap kegiatan politik yang dilaksanakan sangat penting. Hal ini dikarenakan keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah menyangkut serta mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik (Ramlan Surbakti: 1992).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini berupaya mendeskripsikan dan menganalisis mengenai Pengaruh budaya politik terhadap perilaku politik masyarakat menjelang pemilu 2024 di Kecamatan Percut Sei Tuan. Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka dalam penelitian kali ini menggunakan metode penelitian deskriptif Kualitatif.

Menurut (Sugiono,2009) metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.Sedangkan Metode deskriptif menurut (Nawawi,2007), dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini data-data yang dibutuhkan peneliti diambil dari informasi orang ataupun pihak yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan Pemilu 2024 antara lain masyarakat dan Bawaslu di Kecamatan Percut Sei Tuan, dan berdasarkan dokumen-dokumen berupa data tertulis kemudian data-data tersebut, dianalisis untuk kemudian disimpulkan berupa sebuah teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan kekuasaan. Politik dalam sejarahnya merupakan kata yang berasal dari kata "Polis" yang berarti negara kota yang bersifat keseluruhan dengan kesatuan antara negara dengan

masyarakat. selanjutnya, kata “polis” berkembang menjadi “politikos” yang mengandung pengertian sebagai hak-hak kewarganegaraan tertentu. Dan seiring berkembangnya waktu politik secara luas dikenal dengan pelaksanaan hak-hak warga negara dalam keikutsertaan dalam turut serta berperan mengambil bagian dalam pemerintahan. (Halking, 2017)

Politik tidak akan dapat lepas dari kekuasaan. Politik memiliki berbagai pengertian yang memiliki beberapa konsep pokok yaitu state (negara), pemerintahan, power (kekuasaan), decision making (pengambilan keputusan), policy (kebijakan), distribution (pembagian), allocation (alokasi), kegiatan, dan perilaku politik. Melalui beberapa konsep politik tersebut kita mengenal budaya dan perilaku politik saat akan melakukan pesta demokrasi atau yang dapat kita sederhanakan menjadi pemilu.

Pendidikan politik adalah bagaimana suatu negara mewariskan budaya politiknya dari generasi ke generasi. Sedangkan budaya politik adalah penjumlahan nilai-nilai empiris, kepercayaan, dan simbol-simbol yang menentukan terciptanya situasi di mana kegiatan politik berlangsung. Pendidikan politik sebagai proses transmisi budaya politik bangsa meliputi cita-cita politik serta norma-norma operasional sistem organisasi politik yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pendidikan politik harus ditingkatkan sebagai kesadaran politik terhadap hak dan kewajiban warga negara, sehingga diharapkan peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan dan pembangunan negara.

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai wujud kedaulatan sipil, karena dalam pemilihan umum warga negara menjadi bagian yang paling menentukan dalam proses politik di suatu daerah melalui pemungutan suara secara langsung. Partisipasi merupakan aspek penting dari demokrasi. Asumsi dasar demokrasi (partisipasi) adalah bahwa yang paling tahu apa yang baik bagi dirinya adalah dirinya sendiri (Husni, 2021).

Dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini kita akan melihat bagaimana budaya politik yang terjadi dalam masyarakat dan seperti apa perilaku politik yang diperlihatkan masyarakat. Dan bagaimana pengaruh budaya politik di daerah kecamatan Percut Sei Tuan terhadap perilaku politik yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.

Seperti yang ditingkatkan dalam pendahuluan bahwa budaya politik adalah pola pikir, sikap dan perilaku yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah dalam menyikapi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Dalam mempelajari budaya politik dalam masyarakat kita memerlukan pendekatan yang serius dengan masyarakat agar dapat memahami perilaku masyarakat. Pendekatan yang dilakukan dalam memahami budaya politik terbagi dalam

dua jenis yaitu budaya politik ideal dan budaya politik reel. (Halking, 2017).

Pendekatan ini mengenalkan bahwa budaya politik sebagai nilai-nilai, norma-norma, dan simbol politik yang berlaku dalam masyarakat. Dan yang kedua budaya politik dikenalkan sebagai pola sikap dan orientasi individu terhadap kehidupan politik. Dan kedua konsep ini berlaku dalam kehidupan masyarakat dan selalu ada dalam kehidupan masyarakat tersebut. Pendekatan ini lah yang diberlakukan dalam memahami budaya politik yang ada dalam masyarakat. Kebudayaan politik memiliki beberapa rumusan yaitu nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol dalam politik.

Nilai-nilai merupakan konsep yang memberikan penjelasan tentang apa yang dicita-citakan, tujuan yang ingin dicapai atau hal-hal yang diinginkan seperti kemerdekaan, persamaan, kemanusiaan yang adil dan beradab dalam lingkungan masyarakat, persatuan atau rasa nasionalisme, keadilan sosial, persaudaraan, individualisme, demokrasi, kesejahteraan sosial, adil dan makmur, dan lain sebagainya. Dalam lingkungan masyarakat kecamatan Percut Sei Tuan mealalui konspe ini kita dapat melakukan penilaian bagaimana perilaku politik yang ada dalam daerah tersebut. Secara lebih dalam nilai tersebut adalah norma yang berlaku dalam masyarakat yang berwujud sebagai konstitusi ataupun peraturan lainnya yang tertulis dan tidak tertulis.

Pesta demokrasi adalah kegiatan politik yang menimbulkan partisipasi politik dari masyarakat dan melibatkan masyarakat yang menimbulkan perilaku politik masyarakat yang beragam. Proses-proses politik akan menciptakan berbagai partisipasi politik yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok masyarakat. Dalam pesta demokrasi perilaku masyarakat dapat dilihat bagaimana masyarakat tersebut akan memilih seorang pemimpin, bagaimana masyarakat tersebut akan memilih seorang pemimpin apakah seorang tersebut memilih dengan mempertimbangkan pemimpin tersebut layak atau tidak, atau seorang tersebut hanya asal memilih.

Pemilihan umum merupakan momen penting bagi demokrasi di Indonesia. Namun, cara masyarakat menangani pemilihan umum ini dipengaruhi oleh budaya politik mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh budaya politik terhadap perilaku politik masyarakat menjelang Pemilu 2024 di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Partai politik juga berperan penting dalam mempengaruhi perilaku politik masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan, terutama dalam hal sosialisasi dan advokasi politik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan, terutama melalui upaya pendidikan politik dan advokasi politik yang efektif.

Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat memperhatikan pentingnya pendidikan politik dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang proses politik dan hak-hak politiknya. Partai politik juga harus memperhatikan etika politik dan menghindari perilaku politik yang tidak etis, serta melakukan kampanye politik yang efektif dan terbuka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Pemerintah harus memastikan akses pemungutan suara bagi seluruh warga negara, terutama penyandang disabilitas atau mereka yang tinggal di daerah terpencil, dengan tetap memastikan transparansi dan keterbukaan proses pemilihan umum. Masyarakat di Kabupaten Percut Sei Tuan harus didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik dan pemilu, melalui forum diskusi publik dan program partisipatif.

Pada penelitian ini, penulis melakukan survei kuesioner terhadap 200 responden di kecamatan Percut Sei Tuan. Penulis mengumpulkan data tentang tingkat kesadaran politik, partisipasi politik dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik warga di daerah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Percut Sei Tuan memiliki budaya politik partisipatif yang didukung oleh tingkat kesadaran politik yang cukup tinggi. Faktor yang mempengaruhi perilaku politik masyarakat di daerah adalah faktor pendidikan, media, keluarga dan agama. Partai politik juga berperan penting dalam mempengaruhi perilaku politik masyarakat, terutama dalam hal penyebaran informasi dan advokasi politik.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa budaya politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku politik masyarakat menjelang Pemilu 2024 di Kecamatan Percut Sei Tuan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik masyarakat di daerah, termasuk melalui pendidikan politik dan kampanye politik yang efektif. Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik dan perilaku masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan, penulis menyarankan beberapa strategi, seperti meningkatkan pendidikan politik, memperhatikan etika politik, dan memastikan kelangsungan politik, aksesibilitas pemungutan suara untuk semua warga negara dan mendorong masyarakat aktif. partisipasi. berpartisipasi dalam proses politik dan pemilu melalui forum diskusi publik dan program partisipatif.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan partisipasi dan perilaku politik masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan dapat meningkat pada Pemilu 2024 dan menciptakan demokrasi yang sehat dan bersemangat.

Pengertian dan Konsep Budaya Politik

Budaya politik didefinisikan oleh Almond dan Verba (1963) sebagai sikap berorientasi warga negara terhadap sistem politik dan berbagai komponennya, serta sikap terhadap peran warga negara dalam sistem ini. Pemahaman budaya politik ini mengarah pada pemahaman konseptual yang memadukan dua tingkatan orientasi politik, yaitu orientasi sistem dan orientasi individu (Kuswandi, 2010).

Konsep budaya politik sebagaimana didefinisikan oleh Almond dan Verba di atas adalah sikap warga negara yang berorientasi khusus terhadap sistem politik dan berbagai bagiannya, serta sikap terhadap peran warga negara dalam sistem politik. Sistem ini, dapat mengandung pengertian yang luas. Pemahaman budaya politik ini mengarah pada pemahaman konseptual yang memadukan dua tingkatan orientasi politik, yaitu orientasi sistem dan orientasi individu. Sebagai sebuah sistem, organisasi politik seharusnya memiliki orientasi yang ditujukan pada kesejahteraan warga negara.

Sederhananya, dapat diasumsikan bahwa budaya politik suatu masyarakat idealnya tetap menjadi model orientasi dan sikap yang mampu memberikan kontribusi tindakan konstruktif terhadap sistem politik. Pemilu yang damai, pemilu yang rusuh, dan berkurangnya konflik politik di masyarakat adalah ciri-ciri budaya politik yang membaik. Kondisi ini akan berdampak positif pada proses pembangunan yang dipimpin oleh pemerintah terpilih.

Tipe-Tipe Budaya Politik

a. Budaya Politik Parokial (Parochial Political Culture)

Budaya politik paroki mengacu pada bentuk budaya politik di mana orang memiliki keterlibatan politik yang sangat sedikit dan hanya fokus pada kepentingan individu atau kelompok kecil. Dalam budaya politik lokal, masyarakat cenderung tidak mempercayai pemerintah dan tidak berpartisipasi dalam proses politik yang lebih besar (Rahman, 2018).

Orang-orang dengan budaya politik lokal seringkali mengejar politik hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok dan kurang memiliki rasa tanggung jawab atas nasib bersama pemerintah dan kebijakan publik. Mereka tidak tertarik dengan partisipasi politik yang lebih luas, seperti pemilu, kampanye politik, atau debat publik.

Budaya politik lokal seringkali dipandang sebagai penghambat proses demokrasi, karena rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik dapat menghambat pengembangan kebijakan yang inklusif dan responsif kepentingan umum masyarakat. Namun di sisi lain, budaya politik lokal juga dapat dilihat sebagai bentuk kebebasan individu dalam mengambil

keputusan yang menyangkut kepentingan individu atau kelompok, sepanjang tidak menimbulkan kerugian yang berarti bagi kepentingan umum.

Dalam budaya politik lokal, masyarakat cenderung pasif dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan politik nasional. Mereka lebih fokus pada masalah sehari-hari dan kebutuhan lokal, dan memilih pemimpin berdasarkan ikatan pribadi atau kelompok.

Budaya politik lokal banyak dijumpai pada masyarakat dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan politik yang rendah, serta tingkat partisipasi politik yang minim. Keadaan ini dapat menyebabkan masyarakat kehilangan partisipasi dalam pengambilan keputusan politik nasional dan cenderung mengikuti petunjuk atau keputusan kelompok kecil atau tokoh lokal.

Budaya politik lokal seringkali dipandang sebagai bentuk penghambat berkembangnya demokrasi, karena masyarakat dengan budaya politik lokal cenderung tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam proses politik yang lebih besar dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menilai kinerja pemimpin atau calon pemimpin. Oleh karena itu, pengembangan budaya politik partisipatif atau kritis sangat penting dalam membangun demokrasi yang sehat dan dinamis.

b. Budaya Politik Subyektif (Subject Political Culture)

Budaya politik subyektif adalah bentuk budaya politik di mana orang cenderung pasif dan tunduk pada otoritas politik yang berkuasa (Rahman, 2018). Dalam subjek budaya politik, masyarakat kurang sadar akan politik dan kurang tertarik dengan isu-isu politik yang terjadi di sekitarnya. Masyarakat cenderung menerima dan mengikuti apa yang dikomunikasikan oleh penguasa tanpa mempertanyakan atau memperjuangkan haknya secara serius.

Budaya politik subjek sering muncul dalam masyarakat yang berada dalam lingkungan otoriter atau pada masyarakat yang merasa tidak memiliki kendali atas situasi politik di negaranya. Orang yang memiliki budaya politik sebagai subjek cenderung tidak aktif dalam proses politik dan lebih memilih untuk menghindari konflik politik. Budaya politik suatu subjek dapat menghambat perkembangan demokrasi karena orang dengan budaya politik ini cenderung tidak mengontrol atau berpartisipasi dalam proses politik yang berlangsung di negaranya. Oleh karena itu, pengembangan budaya politik partisipatif atau kritis sangat penting untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Dengan mengembangkan budaya partisipatif atau politik kritis, masyarakat dapat memperjuangkan haknya, mempengaruhi kebijakan politik, dan memperkuat demokrasi di negaranya.

Dalam subjek budaya politik, masyarakat beranggapan bahwa pemerintah

memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan dan mengelola persoalan politik tanpa ada keterlibatan masyarakat. Akibatnya, masyarakat kurang terlibat dalam proses politik dan seringkali tidak tertarik untuk memperjuangkan haknya.

Budaya politik subjek sering terlihat pada masyarakat dengan tingkat pendidikan dan partisipasi politik yang rendah, serta kurangnya pemahaman tentang hak politik dan peran masyarakat dalam proses politik. Masyarakat dengan budaya politik sebagai aktor cenderung tidak memperjuangkan haknya atau bahkan tidak menyadari haknya dalam proses politik.

Budaya politik subjek dapat menjadi penghambat perkembangan demokrasi, karena masyarakat dengan budaya politik subjek cenderung pasif dalam proses politik, tidak memperjuangkan hak-haknya, dan kurangnya kesadaran politik. Oleh karena itu penting untuk mengembangkan budaya politik partisipatif dan kritis di mana masyarakat merasa memiliki pengaruh terhadap proses politik dan dapat secara aktif memperjuangkan hak-haknya. .

c. Budaya Politik Partisipan (Participant Political Culture)

Menurut Almond dan Verba, budaya politik partisipan adalah suatu bentuk budaya dimana anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administrasi (Rahman, 2018).

Budaya politik partisipatif adalah bentuk budaya politik dimana masyarakat merasa memiliki peran dan pengaruh dalam proses politik dan terlibat secara aktif dalam kegiatan politik. Dalam budaya politik partisipatif, masyarakat sangat sadar politik dan memahami pentingnya berpartisipasi dalam proses politik.

Masyarakat dengan budaya politik partisipatif cenderung memperjuangkan haknya, berpartisipasi dalam pemilihan umum dan kegiatan politik lainnya, serta mampu menilai kinerja pemimpin atau calon pemimpin secara objektif. Masyarakat dengan budaya politik partisipatif juga cenderung menerima perbedaan pendapat dan menghargai kebebasan berekspresi.

Budaya politik partisipatif merupakan syarat yang sangat penting bagi pembangunan demokrasi yang sehat, karena masyarakat dengan budaya politik partisipatif akan aktif dalam proses politik, mampu memilih pemimpin yang tepat dan aktif memperjuangkan hak-haknya. Budaya politik partisipatif juga dapat meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan politik masyarakat, karena masyarakat menjadi lebih sadar akan masalah sosial dan lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan budaya politik partisipatif melalui pendidikan politik, partisipasi aktif dalam aktivisme politik, dan peningkatan kesadaran politik.

Dalam budaya politik partisipatif, masyarakat sadar politik dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik, baik secara nasional maupun lokal. Orang dengan budaya politik berpartisipasi dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan berpartisipasi dalam proses politik untuk mencapai tujuan bersama.

Budaya politik partisipatif terdapat pada masyarakat dengan tingkat pendidikan dan partisipasi politik yang tinggi, serta pemahaman yang baik tentang hak politik dan peran masyarakat dalam proses politik. Masyarakat dengan budaya politik partisipatif cenderung aktif dalam kegiatan politik, seperti memilih pemimpin, berpartisipasi dalam kampanye politik, berkontribusi pada pemerintahan, dan memantau kegiatan pemimpin.

Budaya politik partisipatif merupakan salah satu bentuk budaya politik yang sangat penting dalam membangun demokrasi yang sehat dan dinamis. Dengan budaya politik partisipatif, masyarakat dapat memperjuangkan haknya dan memengaruhi pengambilan keputusan politik yang lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan budaya politik partisipatif guna memperkuat demokrasi dan menjamin keadilan dalam proses politik.

Perilaku Politik

Perilaku politik adalah interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. perilaku politik akan sangat berpengaruh dan membrikan dampak yang baik untuk pemerintah, namun selain dampak yang positif interaksi tersebut juga memberikan dampak negatif yang dapat mempengaruhi pemerintahan. Perilaku tersebut dapat dilihat dengan lima tipe pendekatan yaitu (Nur et al., 2015):

1. Pendekatan struktural, pendekatan ini menekan untuk memilih dengan pemiiran yang lebih lua, pendekatan ini sudah dapat menilai seorang calon dengan kriteria pemimpin yang layak.
2. Pendekatan Sosiologis, pendekatan ini cenderung menilai calon pemimpin berdasarkan faktor sosiologis calon tersebut. Apakah pemimpin tersebut keren, apakah pemimpin tersebut masih memiliki tali kekeluargaan dengan pemilih, dan penilaian lainnya.
3. Pendekatan Ekologis, pendekatan yang membuat pemilih memilih calon pemimpin tersebut dari faktor daerah, apakah pemimpin tersebut masih satu daerah dengan calon tersebut serta lingkungan yang berdekatan.
4. Pendekatan Psikologis, pendekatan ini dilakukan pemilh setelah melihat psikologis pemimpin tersebut, hal ini cenderung dinilai dari tindakan partai. Hal ini memberikan penilaian dengan perasaan yang dekat dengan partai tersebut.
5. Pendekatan Rasional, pendekatan yang dilakukan dengan cara penilaian

yang kritis, pemilih telah menelusuri latar belakang calon tersebut, apa saja prestasi yang telah diterima oleh calon pemimpin tersebut, serta telah memberikan pertimbangan mengapa calon tersebut layak menjadi pemimpin.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Politik Masyarakat

Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemuda sebagai akibat dari partisipasi masyarakat dalam menentukan kehidupan masyarakat itu sendiri. Tingkat hak masyarakat atas saat ini tidak melakukan identifikasi pemimpin dalam pemilu terlepas dari perubahan politik dan reformasi yang terjadi di Indonesia, Kekuatan dan Kelemahan sekaligus peluang dan tantangan salah satu indikator penting. selain memiliki misi yang visioner terhadap masyarakat dan kepemudaannya sangat antusias, dan memiliki kekuatan untuk menyemangati generasi muda bersama adanya pemerataan pembangunan fasilitas di bidang olahraga, kesehatan dan UMKM di Kecamatan Percut Sei Tuan. Dan memiliki sumber daya alam yang kaya rock, agar generasi muda kabupaten Bantarujeg memiliki banyak harapan pemimpin, untuk melahirkan pertumbuhan harus didahulukan, karena salah satunya penyumbang PAD terbesar (Budi Antono,Ratnia Solihah, 2018).

Strategi untuk Meningkatkan Partisipasi dan Perilaku Politik Masyarakat dalam Pemilu

Beberapa strategi dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi warga dan perilaku politik dalam pemilu:

Formasi politik: Pendidikan politik dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak politik, proses politik, dan perannya dalam pengambilan keputusan politik. Pendidikan politik dapat dilakukan melalui seminar, debat publik, kampanye media sosial, dan penerbitan materi pendidikan politik.

Terbuka dan transparan: Keterbukaan dan transparansi proses politik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem politik. Karena itu, pemerintah harus memastikan keterbukaan dan transparansi proses politik, seperti penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pemilihan umum 2024.

Meningkatkan akses ke pemilu: Pemerintah harus memastikan pemilu dapat diakses oleh seluruh warga negara, termasuk dengan menyediakan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas atau mereka yang tinggal di daerah terpencil. Menggunakan teknologi:

Penggunaan teknologi dalam pemilu dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pemilu. Pemerintah dapat menggunakan teknologi seperti sistem penghitungan suara elektronik dan sistem pemungutan suara online

untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pemilu.

Peningkatan kampanye politik: Kampanye politik yang terbuka, jujur, dan kreatif dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap proses politik. Pemerintah dan partai politik harus berkomitmen untuk menghindari praktik politik yang tidak etis dan melakukan kampanye politik yang efektif.

Meningkatkan keterlibatan masyarakat: Masyarakat harus didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik dan pemilu. Pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam forum diskusi publik, menjalankan program partisipatif seperti budaya partisipatif untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

KESIMPULAN

Mayoritas warga di Kecamatan Percut Sei Tuan memiliki budaya politik partisipatif yang didukung dengan tingkat kesadaran politik yang cukup tinggi. Faktor yang mempengaruhi perilaku politik masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan adalah faktor pendidikan, media, keluarga dan agama. Partai politik memiliki peran penting dalam mempengaruhi perilaku politik masyarakat, terutama dalam hal penyebaran informasi dan advokasi politik.

Perlu upaya untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik warga Kecamatan Percut Sei Tuan, terutama melalui pendidikan politik dan upaya advokasi yang efektif.

Pemerintah harus memastikan aksesibilitas pemilu bagi semua warga negara, terutama untuk orang dengan disabilitas atau yang tinggal di daerah terpencil, serta memastikan transparansi dan keterbukaan dalam proses pemilihan umum. Masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan harus didorong untuk terlibat secara aktif dalam proses politik dan pemilihan umum, melalui forum-forum diskusi publik dan program-program partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 44-51.
- Kuswandi, A. (2010). Membangun gerakan budaya politik dalam sistem politik Indonesia. *Governance*, 1(1), 40-50.
- Antono, B., Solihah, R., & Bintari, A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 (Studi Pada Organisasi Kepemudaan Kecamatan Bantarujeg). *ASPIRASI*, 11(2), 36-49.
- Husni, M. W., & Harmanto, H. (2021). UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM

(KPU) KABUPATEN TUBAN DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI
POLITIK MASYARAKAT. *Kajian moral dan kewarganegaraan*, 9(2), 374-
388